

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya masalah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk itu sendiri maupun karena faktor terjadinya urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangya peluang kerja yang berada pada pedesaan ataupun yang berada di luar kota sehingga masyarakat yang berada di luar kota berbondong-bondong datang ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, dari sinilah timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran kepadatan penduduk permukiman kumuh dan masalah lainnya.

Di Indonesia permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai pada daerah - daerah padat penduduk. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan kualitas lingkungan tersebut. Permasalahan permukiman kumuh perkotaan merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari dan merupakan hal yang pasti dialami setiap kota. Peningkatan jumlah penduduk yang berlebihan dikota tentunya yang menyebabkan kebutuhan akan penyediaan sarana prasarana permukiman semakin meningkat. Akibatnya permukiman akan menerima beban yang melebihi daya dukung lingkungannya dan cenderung akan menjadi kumuh.

Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Penyebab dari ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada dilingkungan akan mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri dan hanya mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, faktor kondisi masyarakat yang terkait satu sama lain dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dalam segi kesehatan

Keinginan untuk terciptanya kawasan yang layak huni dan bersih sejatinya juga merupakan dari cita-cita bangsa. Seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta boleh memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat ini menunjukkan bahwa penanganan masalah permukiman kumuh bukan saja tanggungjawab masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah, yang artinya lingkungan yang layak huni adalah hak dasar warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta

sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menangani fenomena perumahan dan pemukiman kumuh, maka dibutuhkan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Keterlibatan pemerintah dengan cara membuat program kegiatan secara terpadu termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Harapannya agar dapat mengikutsertakan semua kelompok ataupun individu masyarakat dalam kelompok kehidupan bermasyarakat dan dapat membantu memberdayakan mereka. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia.

Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin atau kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Konsep pemberdayaan terkait dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternative untuk menangani permukiman kumuh, karena dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka akan timbul rasa tanggungjawab dan kepemilikan sehingga mereka akan secara sukarela ikut merawat infrastruktur yang telah dibangun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Direktorat Jendral Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa mengusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat

kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. *(dikutip dari pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan umum program kotaku)*

Salah satu yang telah dibenahi melalui Program Kotaku adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalsrejo, Kota Yogyakarta. Tadinya Karangwaru yang merupakan kawasan kumuh, kini telah berubah menjadi kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Buntung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai. Warga juga dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai wadah berbagai kegiatan, menjadi destinasi kegiatan wisata, tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak, serta tempat olah raga seperti lari atau jalan santai.

Pada tahun 2017 lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menetapkan Karangwaru sebagai BKM terbaik tingkat nasional dalam ajang BKM Award 2017. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dikembangkan selama ini berhasil meraih penghargaan di tingkat nasional. BKM Award diikuti oleh sekitar lebih dari 2.500 BKM di seluruh Indonesia. Di tahun 2017 ini, ada tiga BKM mendapatkan anugerah yakni di yang ada di Kendari, Yogyakarta dan Bandung.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri Karangwaru bisa membawa kelurahahan Karangwaru menjadi desa percontohan

program KOTAKU selanjutnya. Modal sosial Karangwaru terbangun dan dibangun oleh kelembagaan bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dalam mengawal penataan bantaran Sungai Kali Buntung. Perlahan tapi pasti, apa yang dilakukan BKM mendapat kepercayaan masyarakat, bahkan antarwarga masyarakat. Dengan sendirinya pihak luar percaya dengan eksistensi masyarakat dan kelembagaan BKM Tridaya Waru Mandiri Kelurahan Karangwaru..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tadi maka yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Krangwaru di lihat dari persepektif pemberdayaan masyarakat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyelenggaran Program Kotaku di Kelurahan Karangwaru berdasarkan persepektif teori pemberdayaan masyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bacaan bagi pembaca. Bagi peneliti sendiri penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sehingga dapat memberikan pengalaman yang mengasah keterampilan peneliti. Dan tidak kalah pentingnya penelitian ini berguna bagi peneliti untuk pemenuhan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan sekaligus bahan evaluasi bagi instansi pemerintahan terutama yang menaungi program Kotaku agar untuk kedepannya mampu melaksanakan program ini lebih baik lagi. Dan diharapkan semua daerah sasaran Kotaku bisa mencontoh segala hal positif terkait pelaksanaan program tersebut di Kelurahan Karangwaru. Semoga penelitian ini juga bisa menambah wawasan masyarakat umum dan menjadi referensi bagi akedemisi untuk penelitian yang lebih baik dikemudian harinya.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat**

#### **1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat 8).

Djohani (2003), mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan.

Edi Suharto (2009) mendefinisikan secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan

kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada sekelompok orang yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas agar mereka memiliki daya dan kemauan untuk berpartisipasi dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan merujuk kepada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yakni masyarakat berdaya, memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah di Indonesia, ditingkat pusat maupun daerah, perlu untuk sampai pada pemahaman bersama bahwa bangsa Indonesia perlu membangun pemberdayaan sebagai metode pembangunan nasional. Bukan karena

pemerintah tidak mempunyai uang cukup banyak untuk melakukan pola pembangunan *government driven*, namun karena model ini akan menjadikan pembangunan sebagai kewajiban bersama antara pemerintah dan rakyat.

## 2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2012), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 1) Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemelihan lokasi dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

### 2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

### 3) Proses Pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. proses tersebut meliputi:
  - a) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
  - b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
  - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
  - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian meliputi:
  - a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
  - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
  - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
  - d) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.

### 3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pengawasan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

### 4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/ PME*)

PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengakajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

### 4) Pemandirian masyarakat

Arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya karena prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *selforganizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh tim fasilitator yang bersifat

multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu factor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

### **1.5.2 Program Penataan Permukiman Kumuh Sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat**

#### 1. Program

Menurut Charles O. Jones (1996:295), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran

c) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa program adalah suatu cara yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki karakteristik yaitu membutuhkan staf, memiliki anggaran sendiri serta memiliki identitas.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi akibatnya muncul pemukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup masyarakat perkotaan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang menimbulkan banyak permasalahan perkotaan (Simollah, 2015). Oleh karena itu diperlukan adanya program penataan permukiman kumuh sebagai upaya mencegah dan memperbaiki masalah lingkungan perkotaan yang ada.

## 2. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Keberdayaan dalam

konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai tujuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut dengan ketahanan nasional.

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya makmur sejahterah adil dan merata. Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Selama ini pembangunan (Sudjatmoko, 1983) didekati dengan berbagai model pendekatan. Diantaranya model pendekatan dari atas kebawah (top down) atau sering disebut model tetesan dari atas (trickle down) dan model pendekatan dari bawah (bottom up).

Menurut Nasikum (2000) paradigma pembangunan yang baru harus berprinsip bahwa pembangunan pertama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya.

Pemahaman tentang paradigm pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people center development*), diawali dengan pemahaman tentang

ekologi manusia, yang menjadi pusat perhatian pembangunan. Pembangunan haruslah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan suatu alternative baru untuk meningkatkan hasil produksi pembangunan guna memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah, akan tetapi peningkatan harus sesuai dengan asas-asas dasar partisipasi dan keadilan dan hasil-hasil itu harus dapat dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia.

### 3. Penataan Permukiman Kumuh Sebagai Bentuk Pemberdayaan

Kawasan atau permukiman kumuh meskipun tidak dikehendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Permukiman kumuh bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi fisik lingkungan permukimannya sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan *power* masyarakat salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan telah menjadi trend positif dengan berbagai keberhasilan di beberapa wilayah di Indonesia. Program ini telah memberikan efek positif

dalam pelibatan masyarakat dengan berbagai stakeholder dalam proses pembangunan. Dalam proses penanganan kawasan permukiman kumuh ini perlu dilakukan dengan proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan lebih mengenal serta mempunyai empati terhadap wilayahnya sendiri, karena untuk era sekarang masyarakat harus bisa mandiri dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah.

Ichlasary (2010) dalam hasil penelitian menyatakan bahwa penataan kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui konsep Tridaya, yaitu: perbaikan kualitas fisik lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di dalamnya. Program Tridaya ini diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat penghuni kawasan kumuh menjadi lebih baik.

Konsep penanganan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan usaha, serta pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu proses peningkatan kemampuan, penggalian sumberdaya lokal, serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam peningkatan kualitas lingkungannya secara mandiri. Bentuk kegiatannya sesuai dengan konsep tri daya adalah pemberdayaan masyarakat untuk memberikan iklim yang mendorong tumbuhnya potensi masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan lingkungannya.

Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat mengembangkan dirinya dalam pencapaian kesejahteraan hidup, dan memahami arti penting menciptakan rumah dan lingkungan yang sehat.

Adanya swadaya masyarakat pada pelaksanaan kegiatan fisik merupakan partisipasi riil dari masyarakat terhadap program peningkatan kualitas lingkungan ke arah mandiri melalui program pendampingan masyarakat. Program ini memerlukan penunjukkan tenaga pendamping masyarakat, yang sebaiknya dipilih oleh masyarakat. Pendamping masyarakat ini berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Program Kotaku sendiri bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya menjadi aspek atau kunci penting dalam pelaksanaan program kotaku karena adanya tujuan untuk mentransformasikan masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya agar mampu menjadi masyarakat berdaya, masyarakat mandiri dan puncaknya menjadi masyarakat madani.

### 1.5.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian ini tentunya penulis melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan atau kajian pustaka merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan untuk menghindari duplikasi. Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang masih relevan dengan apa yang hendak ingin penulis teliti.

Penelitian pertama oleh Siaga Basu Murbeng dkk (2013), dalam jurnal Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi Pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung). Menurut Siaga Basu Murbeng dkk, proses yang dilakukan dalam tahapan– tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan langkah–langkah pengelolaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM–MP). Pelaksanaan program PNPM–MP di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah sebagai program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin Desa Bendungan yang di beri wadah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). Sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Bendungan belajar untuk berorganisasi dan bekerja sama serta lebih berdaya dan berkemandirian sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Partisipasi masyarakat maish didominasi oleh orang tua, di harapkan Pemerintah Desa Bendungan dapat mengoptimalkan peranan organisasi

karang taruna dan pemuda–pemuda Desa Bendungan agar berpartisipasi dalam struktur dan pelaksanaan kegiatan PNPM MP

Kedua penelitian Adita Maya Safira dkk (2018), dalam jurnal Proses Seleksi Lokasi Pada Program Pemeberdayaan Kelompok Sadara Wisata Di Kota Depok. Seleksi lokasi/wilayah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok sudah dilakukan dengan baik. Kriteria dalam seleksi lokasi atau wilayah yang diberikan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok dalam Program Pembinaan Kelompok Sadar Wisata sebagai program pembangunan kepariwisataan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sesuai dengan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan. Konteks komunikasi dari proses seleksi lokasi/wilayah ini tergolong ke dalam konteks komunikasi kelompok dan komunikasi antar pribadi. Masyarakat menjadi salah satu unsur penting untuk bersama-sama dengan pemerintah dan swasta melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan. Peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan adalah sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator). Kalangan swasta atau para pelaku usaha, dengan segala sumber daya, modal, dan jejaring yang dimilikinya, berperan sebagai pengemban dan/atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Sedangkan masyarakat dengan sumber daya yang dimilikinya, baik berupa adat, tradisi dan budaya, serta kapasitasnya sebagai tuan rumah, memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Ketiga Sri Yuliani (2017), meneliti tentang Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh Kota Surakarta. Dan menurut Yuliani kolaborasi yang terjadi dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi dimana seharusnya berjalan dengan menggunakan konsep kolaborasi sesuai dengan SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program KOTAKU tidak semua prinsip berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam prosesnya prinsip Partisipasi, Komunikasi dan Berbagi belum sesuai dengan Prinsip Kolaborasi menurut SE DJCK No 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU. Tapi dalam pengamatannya Sri Yuliani menemukan bahwa prinsip Akseptasi dan Percaya sudah berjalan dalam Kolaborasi dalam Perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Semanggi. Selain itu dari hambatan yang ditemukan penulis terkait dengan pelaksanaan tahap perencanaan di Kelurahan Semanggi adalah sebagai berikut: a) Kendala Sumber Daya Manusia berupa belum adanya ketetapan SK Pokja PKP tentang pemegang tugas pokok secara jelas. b) Kendala Komunikasi berupa sulitnya menentukan waktu yang tepat dalam pengadaan koordinasi dikarenakan secara umum begitu banyak stakeholder yang terlibat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini

melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

### **1.6.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta.

### **1.6.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi atau fakta yang bersumber langsung dari informan yang diteliti yakni berupa jawaban-jawaban langsung dari berbagai pertanyaan atau informasi yang diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara mendalam. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi berbagai fakta dan informasi yang diungkapkan oleh informan berkaitan dengan pertanyaan terkait penelitian yang sedang penulis kerjakan.

#### **2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi atau fakta yang bersumber dari berbagai dokumen, buku-buku, laporan, artikel, catatan dan sebagainya yang telah dilakukan oleh pihak

lain. Data sekunder yang dalam penelitian meliputi berbagai informasi atau data yang menyangkut argumen, pandangan atau catatan oleh para *stakeholders* yang dikerjakan oleh pihak lain.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2006:75). Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2006:229).

##### b. Wawancara

*Interview* (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2007:137). Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara guna mendapatkan data yang dapat menjawab data yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan terbuka yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang kompleks.

#### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:240).

#### **1.6.5. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menceritakan apa yang ia ketahui terkait dengan apa yang sedang diteliti. Adapun subjek penelitian ini adalah:

- Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta selaku penanggung jawab utama dari pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten (Bapak Sigit Setiawan selaku kepala Bidang Kawasan Permukiman)
- Konsultan Kota Tanpa Kumuh Kota Yogyakarta selaku koordinator dan fasilitator program Kota Tanpa Kumuh tingkat kabupaten/kota ( Bapak Mahmud Alhrizy selaku Koordinator Konsultan Kotaku Kota Yogyakarta dan Bapak Asrodiono selaku Fasilitator Kelurahan).
- Badan Keswadayaan Mandiri (BKM) Tridaya Waru Mandiri Kelurahan Karangwaru ( Bapak Gatot Suprihadi dan Bapak Sugito selaku pimpinan kolektif BKM )
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Krangwaru ( Bapak Subandono selaku ketua LPMK )

- Komunitas Karangwaru Riverside dan masyarakat lainnya yang terlibat dengan kegiatan yang sedang penulis teliti ( Mas Cahyo selaku Ketua KKR)

#### **1.6.6. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif, sesuai pemikiran Maxwell (1996:78-79) menerangkan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen harus dianalisis melalui tiga tahapan, yakni *reading the transcript, categorizing and contextualizing*. Yaitu membaca transkrip dari hasil penelitian lapangan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan kategori-kategori yang bisa ditentukan serta menginterpretasikan melalui proses kontekstualisasi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini, adalah mencatat secara seksama semua informasi, catatan dan transkrip dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para informan, observasi dan hasil pengamatan lapangan. Catatan ini berupa transkrip hasil wawancara dan hasil survey

Selanjutnya, langkah kedua adalah jawaban atau informasi tersebut di coding, dikelompokkan atau dikategorisasi (Creswell 2009: 185) pada kecenderungan jawaban yang sejenis atau mirip antara informan satu dengan informan lainnya. Data ini dipilah-pilah berdasarkan isu-isu yang akan menjadi bahan untuk dianalisis sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian.

Langkah ketiga, analisis data dilakukan menggunakan metode interpretasi (Creswell 2009: 176) terhadap jawaban atau informasi yang diberikan oleh informan sesuai dengan klasifikasi masing-masing yaitu dari kelompok aktor birokrat, aktor swasta dan aktor tokoh masyarakat. Interpretasi data yang diperoleh dari kelompok aktor pemerintah dan aktor swasta dan aktor masyarakat umum ini akan dilakukan dengan melakukan penarikan kesimpulan atas berbagai ungkapan, pandangan, argumen, persepsi mereka dengan cara membandingkan secara kualitatif dengan realitas pelaksanaan Program Kotaku dilapangan. Triangulasi dilakukan terhadap *cross check* jawaban dari berbagai informan dan juga diperbandingkan fakta atau data yang diperoleh di lapangan (*cross referencing*).

Langkah terakhir, analisis data dilakukan secara mendalam dan detail melalui persandingan antara hasil temuan di lapangan dengan berbagai macam teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan teori dan kerangka pemikiran (Creswell 2009: 185-186). Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan apakah temuan-temuan baru itu mendukung penuh teori yang ada (terdahulu), mendukung sebagian teori yang ada (terdahulu) atau mungkin berbeda (ada temuan-temuan baru) dengan teori-teori yang terdahulu tersebut. Analisis dan pembahasan terhadap keterkaitan informasi

data primer yang diperoleh dengan pandangan teoritik atau penelitian terdahulu akan menjadi bahan pijakan untuk menarik simpulan ataupun temuan-temuan penelitian